



**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA
DAN HUKUM ADMINISITRASI NEGARA (PP APHTN-HAN)
PERIODE 2005-2020**

- Yang terhormat para pengurus Pimpinan Pusat APHTN-HAN
- Yang kami hormati para ketua wilayah APHTN-HAN se-Indonesia yang hadir pada kesempatan ini.
- Yang kami hormati para peserta Munas VI APHTN-HAN yang baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual.
- Para Peninjau dari berbagai wilayah APHTN-HAN yang juga hadir secara langsung maupun virtual.
- Segenap panitia baik Steering Committee (SC) maupun Organising Committee (OC) dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om santi-santi om, namo budaya dan salam kebajikan.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kita semua bisa hadir baik secara langsung maupun secara virtual dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) ke-6 yang kegiatannya secara langsung dipusatkan di Samarindah, Kalimantan Timur, ini.

Semestinya, kegiatan Musyawarah Nasional ini dilaksanakan secara langsung atau tatap muka, sebagaimana kegiatan-kegiatan sebelumnya seperti Musayawarah Kerja Nasional (Mukernas) atau Konvensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dimana setiap kegiatan menjadi ajang bertemunya para insan pengajar HTN dan HAN berdebat dan mendiskusikan berbagai isu aktual nasional seputar hukum tata negara dan hukum admisnitrase negara. Dan hasil dari perdebatan itu dirumuskan dan direkomendasikan kepada pemerintah dan DPR baik pusat maupun daerah sebagai sumbangsih pemikiran sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab akademik para insan pengajar HTN dan HAN untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Momen itu tak lepas pula dijadikan sebagai ajang reuni, melepas kangen dan penat, sejenak menghempaskan beban perkuliahan yang setiap hari menumpuk membebani para pengajar HTN-HAN di kampus masing-masing. Akan tetapi, karena pandemi Covid-19 belum berakhir maka kita harus rela menerima kenyataan untuk sementara menahan diri tidak berkumpul dan bertatap muka.

Dahsyatnya wabah covid-19 tidak hanya memakan korban jiwa manusia akan tetapi meluluh-lantahkan sendi-sendi perekonomian dunia yang mengakibatkan mayoritas umat manusia di dunia mengalami penderitaan. Pada kesempatan ini marilah kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita kembali hidup normal seperti sediakala. Namun, sepanjang kita masih berada dalam situasi pandemic ini, tetaplah menjaga diri dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Ini dilakukan semata-mata agar kita semua terhindar dari serangan wabah mematikan ini.

Bapak/Ibu hadirin peserta Munas yang berbahagia.

Mengawali laporan pertanggung jawaban ini, ijinkanlah kami menyampaikan bahwa kepengurusan APHTN-HAN ini telah melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Sebagaimana amanat Munas ke-5 yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2015 di Surabaya, kami dibebani untuk mengelola organisasi pengajar ini agar tetap hidup, berkembang dan lebih maju dari sebelumnya. Sungguh ini merupakan amanat yang sangat berat dimana kondisi organisasi pada saat itu berada pada titik antara hidup dan mati. Akan tetapi dengan kebulatan tekad dan kebesaran hati demi kemajuan ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara dengan segala kemampuan yang kami miliki, organisasi ini mampu hidup dan berkembang serta diperhitungkan dalam kancah percaturan nasional.

Semua ini tidak lepas dari dukungan para senior dan pengurus terdahulu seperti Prof. Dr. Jimly Assidhiq, Prof. Abdul Bari AZ., Prof. Dr. Sukowiyono, Dr. Martono dan beberapa senior lainnya yang bersedia bergabung dan memberikan bimbingan serta arahan. Untuk itu, kepada mereka kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hadirin peserta Munas yang berbahagia.

Bila menilik pada kondisi objektif asisoasi pada saat itu, hanya terdapat enam wilayah yang aktif kepengurusannya, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Dari enam wilayah tersebut beberapa telah habis masa bhaktinya (berdasarkan Surat Keputusan) dan sebagian yang lain masih hidup. Melihat kondisi ini, langkah awal yang kami lakukan adalah membentuk kepengurusan di tingkat pusat. Pembentukan ini dimaksudkan agar roda organisasi bisa berjalan dengan optimal dengan merekrut para ahli HTN-HAN dari berbagai kampus ternama yang mempunyai jiwa organisatoris. Dan Alhamdulillah, pada bulan Maret 2016 kepengurusan di tingkat pusat terbentuk. Setelah itu kami melakukan rapat kerja di Jakarta, bertempat di Hotel NAM Kemayoran untuk menyusun program kerja sekaligus pelantikan pengurus. Pada saat itu dilaksanakan pula seminar nasional dengan mengambil tema "Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah" yang diliput oleh media nasional.

Hadirin sekalian yang kami hormati.

Sejak saat itu, organisasi ini mulai bergeliat menapakkan rodanya menyusuri jalan peradaban untuk membangun eksistensinya. Komitmen untuk memperbaiki negara dengan menegakkan aturan sesuai ilmu hukum tata negara dan hukum

administrasi negara dijadikan ruh perjuangan untuk terus berkontribusi bagi kebaikan tatanan kehidupan kenegaraan. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga menjadi agenda yang terus digaungkan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satu wujud konkritnya, pada bulan Juni 2017 APHTN-HAN bersama Pusat Studi Konstitusi (Pusako) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan hasil kajian 132 pakar hukum tata negara se-Indonesia yang isinya mendukung agar KPK agar tidak tidak mengikuti kehendak panitia khusus (pansus) hak angket yang dinilai pembentukannya menyalahi prosedur hukum yang ditentukan. Sebelumnya, bersama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar seminar dan Rapat Kerja Nasional ke-2 di Cisarua Bogor. Pada saat itu dilaksanakan pula penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU kerjasama antara MK dengan APHTN-HAN mengenai pengembangan pendidikan dan pengajaran pendidikan tinggi hukum.

Semenjak saat itu, nama APHTN-HAN mulai santer terdengar dan diperhitungkan dalam belantika percaturan nasional. Sejak saat itu pula banyak daerah meminta dibentuk kepengurusan daerah. Dari sini kendala mulai muncul, sebab pembentukan daerah tidak hanya sebatas mengeluarkan Surat Keputusan akan tetapi diminta hadir pula untuk melantik para pengurus yang sudah dibentuk. Kami memahami, adanya perasaan bangga dari teman-teman pengajar di daerah jika pengurus pusat, terutama ketua umum, hadir dan melantik kepengurusan.

Akhirnya, bermodal kedekatan dan hubungan yang baik antara ketua umum APHTN-HAN, Prof. Dr. Mahfud MD dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) terjalinlah kerjasama kegiatan antara APHTN-HAN dengan Biro Pengkajian MPR RI. APHTN-HAN dipercaya untuk melaksanakan kegiatan Focus Discussion Group (FGD) dengan tema : Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN. Dengan kegiatan tersebut MPR berharap memperoleh masukan berdasarkan kajian akademik dari para pakar HTN-HAN mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional yang ideal. Kesempatan itulah yang kami manfaatkan untuk melantik kepengurusan di tingkat daerah. Dari kegiatan tersebut, pengurus pusat bisa melantik (7) tujuh pengurus daerah yakni Bali, Sulawesi Utara, Aceh, Gorontalo, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Sedangkan satu kegiatan yakni di Pekanbaru tidak dilaksanakan pelantikan karena sudah dilantik sebelumnya oleh ketua umum. Pada saat itu hanya dilaksanakan konsolidasi untuk pemantapan organisasi.

Selanjutnya, Biro Pengkajian MPR memberi program lagi yakni FGD dengan tema “ Penguatan Kelembagaan MPR Dengan Pembentukan Undang-Undang Tersendiri”. Dari kerjasama tersebut, pengurus pusat dapat melantik tujuh pengurus daerah yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

Untuk semakin memperbanyak daerah yang dibentuk dan dilantik, APHTN-HAN membangun kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melalui Komisioner Bawaslu, Bapak Fritz Edward Siregar. Bawaslu RI mengajak APHTN-HAN mendiskusikan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari kegiatan tersebut kami dapat melantik Kalimantan Timur, Kalimantan

Barat, dan DKI Raya. Dari sini dapat kami sampaikan bahwa selama kepengurusan Ketua Umum Prof. Dr. Mahfud MD dan Sekjen Himawan Estu Bagijo telah melahirkan 23 Kepengurusan baru dan menghidupkan kembali 3 kepengurusan lama.

Bapak/Ibu peserta Munas yang berbahagia

Memang, terdapat beberapa kepengurusan daerah yang sudah terbentuk dan diberi surat keputusan namun belum melaksanakan pelantikan. Hal ini semata-mata karena kita sedang terterpa musibah Covid-19 yang tidak memungkinkan melaksanakan acara secara tatap muka. Program yang dicanangkan oleh pengurus pusat, beberapa pengurus daerah tersebut akan dilantik secara serentak pada acara Munas VI di Samarindah ini, dengan asumsi pandemic covid telah berlalu. Akan tetapi karena takdir berbicara lain, pandemi covid masih belum selesai maka pelantikan urung dilaksanakan.

Bapak/Ibu peserta Munas yang berbahagia

Sebagai langkah konsolidasi organisasi setiap tahun APHTN-HAN melaksanakan rapat kerja nasional. Rapat kerja dimaksudkan untuk mendengarkan dan mengevaluasi secara berkala implementasi program yang telah dijalankan oleh masing-masing kepengurusan daerah. Sebaliknya, forum ini juga menjadi ajang evaluasi pengurus daerah atas kinerja pengurus pusat. Dan seperti biasa, forum APHTN-HAN selalu disertai dengan kajian seputar tema HTN dan HAN. Selama lima tahun berjalan sebanyak enam kali Mukernas yang kesemuanya dilaksanakan dengan pola kerjasama kegiatan dengan MPR RI, Mahkamah Konstitusi, Pemerintah Daerah, dan pihak swasta.

Selain itu, semenjak tahun 2017 PP APHTN-HAN bekerjasama dengan Pusako dan Puskapsi Universitas Jember melaksanakan Konvensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke -4. Kegiatan pertama dilaksanakan di Jember Jawa Timur dengan mengambil isu besar mengenai Penataan Regulasi di Indonesia. Kegiatan ini terselenggara berkay kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, MPR RI, Mahkamah Konstitusi dan pemerintah Kabupaten Jember. Selanjutnya, pada tahun 2018 bekerjasama dengan pusako melaksanakan KNHTN ke-5 di Batusangkar Sumatera Barat dengan mengusung tema Tantangan Menjaga Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Umum. Dan terakhir PP APHTN-HAN melaksanakan KNHTN ke-6 di Jakarta dengan mengusung tema Memperkuat Kabinet Presidensial Efektif. Kegiatan ini dibuka oleh Presiden RI di Istana Negara pada tanggal 5 September 2019.

Bapak/ibu peserta Munas yang berbahagia

Demikian perjalanan kepengurusan PP APHTN-HAN semenjak kami diberi mandat melalui Munas Surabaya. Suka dan duka mewarnai perjalanan kami dalam membangun dan membesarkan organisasi ini. Akan tetapi berkat kerja sama seluruh pengurus pusat dan ditopang oleh koordinasi yang baik dengan seluruh pengurus daerah, kami mampu berhasil melewati tantangan berat ini dengan baik. Keberhasilan ini tak lepas pula dari dukungan dari berbagai pihak baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta pihak swasta. Semua ini terjadi karena kami selalu membuka diri untuk bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan pemerintah agar dapat mengunduh program yang dapat disalurkan ke berbagai pengurus daerah. Meski begitu, independensi tetap kami jaga dan pertahankan agar idealisme organisasi tidak tergadaikan.

Akhirnya, laporan ini kami serahkan kepada pengurus daerah untuk menilai apakah kerja-kerja yang kami lakukan telah sesuai dengan amanat yang dibebankan kepada kami. Hanya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa kami berpasrah dan senantiasa mengharapkan bimbingan dan pertolongannya. Terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua, shalom, om santi-santi om, namo budaya

Samarindah, 3 Pebruari 2021

PP APHTN HAN

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD
Ketua Umum

Dr. Himawan Estu Bagijo, SH.,MH
Sekretaris Jenderal